

**ANALISIS EKONOMI POLITIK *NON-COMPLIANCE* INDONESIA TERHADAP
*FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)***

Hijrah Nasir

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan atau pertimbangan pemerintah Indonesia belum mengaksesi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dari perspektif ekonomi politik antara lain: kepentingan berbagai aktor, keterbatasan kapasitas, pengaruh akses terhadap perdagangan tembakau Indonesia, implementasi FCTC oleh Negara anggota, dan proyeksi kemungkinan Indonesia untuk *comply* terhadap regulasi ini. FCTC yang berisi sejumlah instrument pengendalian tembakau disusun oleh WHO pada tahun 1999. Penelitian ini menjadi penting karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menjadi Negara anggota meskipun sebagai Negara kelima terbesar di dunia dalam hal konsumsi rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara ke sejumlah sumber terkait serta data penunjang lainnya dari buku dan dokumen-dokumen publikasi. Penulis menganalisis hal tersebut dengan menggunakan konsep Chayes tentang *compliance* dan *non-compliance* Negara terhadap suatu perjanjian internasional, antara lain ambiguitas dan keterbatasan kapasitas serta factor kepentingan, norma, dan efisiensi. Dalam melihat permasalahan ini, kita dapat menjelaskan bahwa kepentinganberbagai pihak yang berbedamenyebabkanpemerintahbelum mengaksesi, antara lain terkait dengan perbedaan prioritas antar-kementerian, hadirnya actor bisnis yang memiliki *power* kuat untuk mempengaruhi pemerintah, aspek ketenagakerjaan, petani dan aspek sosial budaya. Indonesia di tahun-tahun mendatang kemungkinan akan mengaksesi FCTC dengan pertimbangan bahwa Kementerian Perindustrian menyusun *Roadmap* Pertembakauan untuk aspek jangka panjang (2015-2020) dimana kesehatan menjadi prioritas lebih dibandingkan aspek penerimaan dan tenaga kerja serta semakin banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan aturan pengendalian rokok. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan akses FCTC.

Keywords: Framework Convention on Tobacco Control, non-Compliance, akses



POLITICAL ECONOMY ANALYSIS IN NON-COMPLIANCE INDONESIA TOWARDS FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL

Hijrah Nasir

Abstract

This research attempts to analyze the reason or consideration of Indonesian government to not ratify Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yet, in political economy analysis comprises interest of many actors, limitations of capacity of state, the influence of ratification towards Indonesian tobacco trade, FCTC implementation among the Parties, and projection of Indonesia's possibility to comply with this regulation. FCTC has a number of instruments in tobacco control which was arranged by World Health Organization since 1999. This research become necessary due to Indonesia as only one a country in Asia which have not ratified yet, whereas Indonesia has been the fifth biggest of tobacco consumer in the world. It is a qualitative research, where data were collected through interview technique to the certain sources, and other supporting data from books and publication document. It has been analyzed using Chayes concept about compliance and non-compliance with international regulatory agreement consist of ambiguity and lack of capacity, interests, norms, and efficiency. In observing this issue, we can clarify that different interests of actors have become major consideration of Indonesian government to not comply with this convention regarding on the differences priority within ministry, the existence of business actors to influence the decision maker, employment, tobacco farmers, and social cultural aspects. In the forthcoming, there is a possibility that Indonesia will ratify FCTC due to Tobacco Roadmap which is arranged by Ministry of Industry of Indonesia in long-term planning assert that health aspect will be the main priority more than state revenues and employment. In addition, there are a lot of regencies and cities in Indonesia which have been implementing tobacco control regulation. This research, eventually, is expected to provide input analysis to the government in accordance with FCTC.

Keywords: Convention on Tobacco Control, non-Compliance, ratify